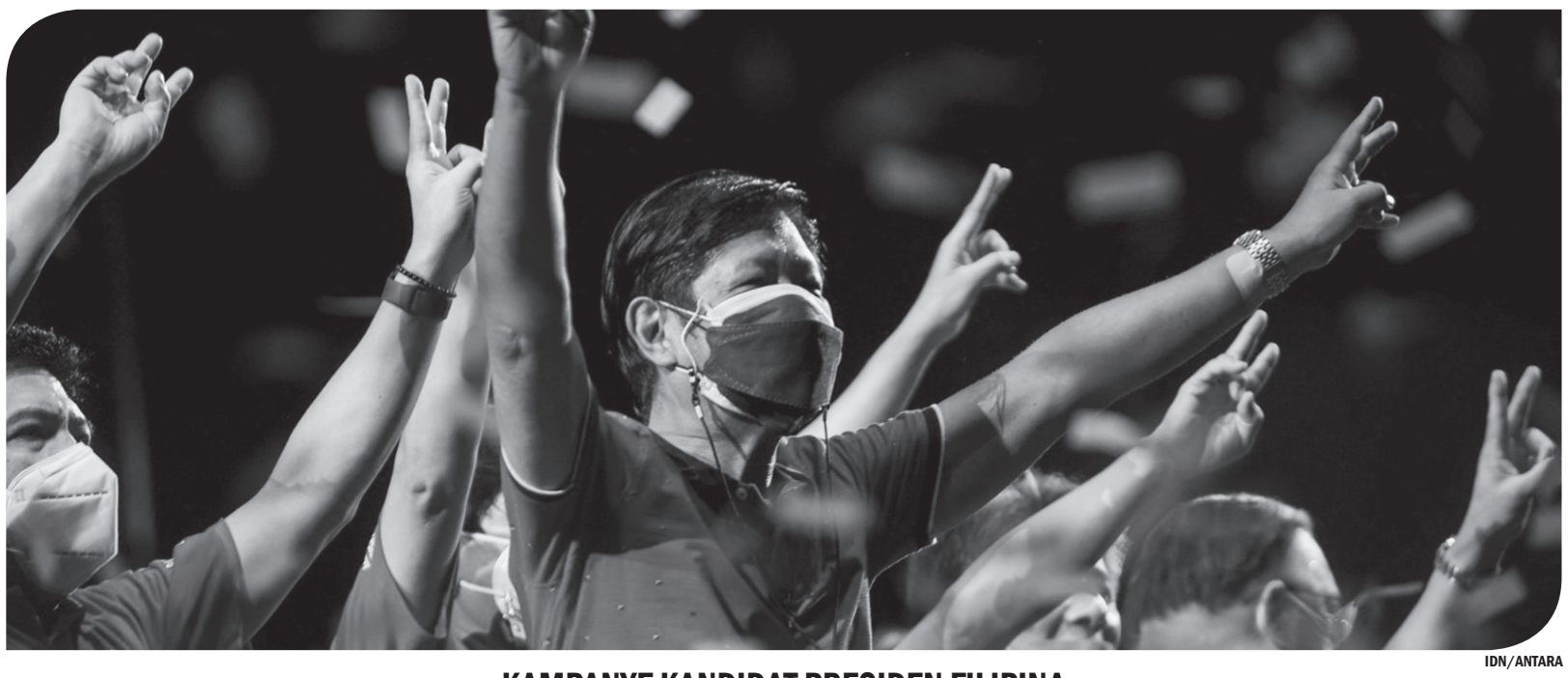

IDN/ANTARA

KAMPANYE KANDIDAT PRESIDEN FILIPINA

Kandidat presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator Ferdinand Marcos, mengangkat tangan selama kampanye di Quezon City, Metro Manila, Filipina, Senin (14/2).

PBB Khawatir Perang Ukraina Tidak Bisa Dicegah

Sekjen PBB Antonio Guteres mendesak para pemimpin dunia untuk menggencarkan diplomasi guna menenangkan keadaan.

NEW YORK(IM)-Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan dirinya sangat khawatir soal peningkatan ketegangan soal Ukraina dan "spekulasi yang meningkat" bahwa konflik militer akan terjadi. Ia mendesak para pemimpin dunia untuk menggencarkan diplomasi guna menenangkan keadaan.

"Bahkan kemungkinan tentang konfrontasi yang membawa bencana seperti itu tidak bisa kita terima," kata Guterres kepada pers, Selasa (15/2), setelah makan siang dengan para duta besar negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Senin, mengatakan ia mendengar kabar bahwa Rusia akan melakukan serangan pada Rabu (16/2). Amerika Serikat mengatakan Moskow sedang meningkatkan kekuatan militernya. Rusia, sementara itu, telah memberi isyarat untuk terus melakukan dialog dengan negara-negara Barat dalam upaya meredakan krisis keamanan.

"Sekarang adalah waktunya untuk menurunkan ketegangan dan mengurangi pergerakan di lapangan. Tidak ada tempat bagi retorika panas. Pernyataan terbuka harus ditujukan untuk menurunkan ketegangan, bukan untuk mengobarkan," ujar Guterres.

Sebelumnya pada Senin, Sekjen PBB melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri Rusia dan Ukraina secara terpisah. Guterres kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa dirinya akan tetap "menjalin kontak secara penuh dalam jam-jam dan hari-hari ke depan". Sekjen menekankan bahwa Piagam PBB mengamanatkan semua negara anggota agar "dalam hubungan internasional menahan diri untuk tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun".

Ia mengingatkan semua pihak untuk terus mengupayakan diplomasi, bukan konfrontasi, dalam mencari penyelesaian konflik."Ini permohonan saya: Jangan gagal dalam mewujudkan perdamaian," katanya.

PBB, seperti yang dikatakan juru bicaranya Stephane Dujarric pada Senin, tidak berencana mengevakuasi atau memindahkan satu pun anggota stafnya keluar dari Ukraina. Dujarric mengatakan ada lebih dari 1.600 anggota staf PBB yang bertugas di Ukraina. Sebanyak 220 dari mereka adalah warga negara asing dan lebih dari 1.400 merupakan warga Ukraina.

Sementara itu, hal yang sama diungkapkan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris Raya James Heappey memperingatkan bahwa ancaman perang di Eropa akibat krisis Rusia-Ukraina amatlah nyata. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan BBC Radio, Selasa (15/2).

Heappey menyebut, sejak Perang Dunia Kedua, ancaman perang di Eropa kini menjadi yang paling "dekat".

Kendati demikian, peringatan Heappey itu tak sepenuhnya benar. Pasalnya, Eropa beberapa kali diterpa konflik militer usai Perang Dunia Kedua, di antaranya adalah perang di Balkan dan Nagorno-Karabakh. "Kita lebih dekat daripada situasi yang pernah kita alami di benua ini 70 tahun terakhir," kata Heappey kepada BBC via The Guardian.

Heappey menggarisbawahi pasokan persediaan di samping konsentrasi lebih dari 100.000 pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Politikus Partai Konservatif itu khawatir Rusia tidak sekadar menghendaki posisi tawar yang lebih kuat dengan pengerahan tersebut, tetapi benar-benar berniat menginvasi Ukraina.

"Terdapat 130.000 pasukan Rusia di sekitar perbatasan Ukraina, ribuan lain berada di kapal amfibi di Laut Hitam dan Laut Azov," kata Heappey.

"Semua elemen tempur ada di tempatnya dan saya takut ini semua bukan hanya tentang pertunjukan untuk memenangkan diplomasi. Itu tidak memerlukan logistik, bahan bakar, pasokan medis, aset penghubung, dan barang-barang yang membuat kekuatan invasi kredibel. Namun, semua itu kini ada pada tempatnya," lanjutnya.

Rusia bersikeras agar NATO tidak menerima Ukraina sebagai anggota dan menarik pasukan serta persenjataan dari Eropa Timur. Namun, NATO dan Amerika Serikat (AS) menolak tuntutan itu. Upaya Barat untuk bernegosiasi dengan Rusia pun sejauh ini berjalan buntu. Presiden AS, Prancis, dan NATO telah berbicara dengan Kremlin tetapi belum membuahkan hasil berarti. Pekan ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengunjungi Kyiv dan Moskow untuk menegosiasikan solusi diplomatis. Kremlin sendiri mengaku berniat meneruskan negosiasi lebih jauh.

"Ini adalah masa yang sangat serius bagi seluruh dunia, sungguh. Bersama-sama mengirim pesan ke Rusia bahwa perilaku mereka tidak akan diterima dan kita di belakang Ukraina, dan sanksi menetapkan sanksi finansial jika mereka nekat melintasi perbatasan akan benar-benar berarti," pungkas Heappey. ● **tom**

Militer Myanmar Dilaporkan Lakukan Kejahatan Perang di Karenni

NAYPYITAW (IM)- Laporan Kelompok hak asasi manusia Fortify Rights pada Selasa (15/2) menyebutkan, militer Myanmar melakukan kejahatan perang di negara bagian Karenni. Mereka telah membunuh warga sipil, dan menggunakan mereka sebagai tameng manusia dalam serangkaian kekejaman di Karenni.

Fortify Rights mengatakan, mereka mendokumentasikan serangan terhadap gereja, tempat tinggal, kamp untuk orang-orang terlantar dan target non-militer lainnya di Karenni antara Mei 2021 dan Januari 2022. Setidaknya 61 warga sipil tewas selama serangan itu. Fortify Rights mengatakan sudah saatnya ASEAN memberikan dukungannya terhadap embargo senjata global. "Junta Myanmar membunuh orang dengan senjata yang diperoleh di pasar global, dan itu harus dihentikan. Dewan Keamanan PBB harus segera memberlakukan embargo senjata global terhadap militer Myanmar, dan sangat strategis bagi ASEAN untuk mendukungnya," ujar Direktur Regional Fortify Rights, Ismail Wolff, dikutip Aljazirah.

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis Myanmar hanya menghasilkan sedikit kemajuan. ASEAN juga telah berusaha untuk mengambil inisiatif dengan membuat konsensus lima poin, namun belum mampu mengatasi krisis di Myanmar. Fortify Rights mengatakan, sudah waktunya bagi ASEAN untuk mengambil sikap tegas terhadap para pemimpin kudeta. Fortify Rights mendesak ASEAN untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional yang dibentuk oleh politisi terpilih yang dicopot dari jabatan oleh militer serta perwakilan dari kelompok etnis.

"Junta bukanlah sebuah pemerintahan, itu adalah perusahaan kriminal dan tidak termasuk dalam meja ASEAN. Akan berbahaya bagi ASEAN untuk memberi legitimasi politik bagi Min Aung Hlaing dan junta," ujar Wolff.

Laporan Fortify Rights didasarkan pada kesaksian dari 31 saksi mata dan penyintas, serta bukti foto dan video yang diverifikasi. Laporan ini mencakup detail baru tentang pembunuhan dengan cara dibakar pada Malam Natal di Kotapraja Hpruso, yang menewaskan 40 warga sipil, termasuk seorang anak dan dua staf Save the Children. Seorang dokter yang mengerjakan otopsi korban tewas mengatakan, beberapa jenazah terbakar sangat parah sehingga tidak mungkin untuk diautopsi. Tetapi timnya dapat memastikan bahwa lima jenazah adalah perempuan dan satu perempuan di bawah umur.

"Beberapa mulutnya disumpal dengan kain, jadi kami yakin orang-orang ini disumpal. Hampir setiap tengkorak retak dan retak parah. (Dalam beberapa jenazah), kami dapat mengumpulkan cukup bukti untuk mengatakan bahwa mereka dibakar hidup-hidup sampai mati," kata dokter tersebut bersaksi kepada Fortify Rights.

Dalam kasus lain, Fortify Rights mengatakan tentara Myanmar menggunakan seorang pria berusia 18 tahun, dan dua pria lainnya sebagai perisai manusia selama bentrokan dengan pejuang dari Pasukan Pertahanan Rakyat Karenni (PDF) di Kotapraja Moe Bye yang berbatasan dengan negara bagian Shan. Fortify Rights mengatakan, tiga dari pria itu akhirnya melarikan diri. "Para prajurit meletakkan senjata mereka di pundak kami dan menembak PDF. Kami terus diikat dan ditutup matanya. Kami banyak disiksa. Mereka menendang tubuh kami, memukul kepala kami dengan gagang senjata, dan masih banyak lagi," ujar kesaksian pria itu.

Para jenderal telah menggunakan kekerasan dalam upaya untuk meletakkan oposisi publik terhadap kekuasaannya. Mereka menindak aksi protes dan meningkatkan serangan terhadap milisi sipil anti-kudeta. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan, setidaknya 1.549 orang telah tewas sejak junta militer melakukan kudeta pada Februari tahun lalu. Selain itu, lebih dari 12 ribu orang telah ditangkap.

Fortify Rights mengatakan, pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing dan pasukannya mengklaim memerangi teroris. Namun sebaliknya, pasukan mereka melakukan kejahatan kekejaman massal terhadap penduduk sipil dengan impunitas penuh.

Fortify Rights mengatakan embargo senjata global yang dipimpin PBB untuk melarang penjualan senjata dan teknologi penggunaan ganda kepada pasukan keamanan sangat penting. Menurut laporan kelompok itu, PBB harus menjatuhkan sanksi tambahan untuk menolak akses militer ke sumber dana, pendapatan yang paling signifikan dari penjualan gas alam. ● **gul**

Myanmar tak Hadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN

BANGKOK(IM) - Pemerintah Myanmar mengatakan tidak akan menghadiri pertemuan menteri luar negeri Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) pekan ini. Naypyidaw menolak undangan yang meminta mereka mengirimkan perwakilan non-politik bukan kepala diplomatnya.

Pada bulan ini Kamboja yang menjabat sebagai ketua bergilir ASEAN mengatakan kawasan itu gagal mencapai konsensus mengenai undangan ke Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin dalam pertemuan yang digelar Kamis (17/2) dan Jumat (18/2) di Phnom Penh, Kamboja.

Pemerintah militer Myanmar menunjuk Wunna Maung Lwin sebagai menteri luar negeri usai kudeta tahan lalu. Ketika junta menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Keputusan membatasi partisipasi Myanmar mencerminkan ketidaksetujuan negara anggota ASEAN pada lemahnya kerja sama Myanmar mengimplementasikan lima langkah yang disetujui tahun lalu. Langkah-langkah yang dinilai akan membantu meredakan kekerasan dan gejolak politik di negara itu.

Atas alasan itu ASEAN tidak mengundang kepala pemerintah militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam pertemuan kepala negara pada Oktober tahun lalu. Tindakan ini diambil tidak lama setelah Myanmar menolak utusan khusus ASEAN bertemu Suu Kyi yang berada di tahanan sejak militer berkuasa.

"Terlepas dari upaya yang dilakukan ketua ASEAN dan Myanmar dalam mempromosikan kerja sama di ASEAN, disayangkan untuk melihat kembali keputusan yang diambil tahun lalu yang prinsipnya tidak biasa diterima Myanmar," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataannya, Selasa (15/2).

"Dalam hal ini Myanmar tidak dapat berpartisipasi atau bahkan mengirimkan perwakilan non-politik, hal ini tidak dapat dihindari karena bertentangan dengan prinsip dan praktik perwakilan setara di ASEAN," tambah kementerian.

Tahun lalu Brunei yang mendapat giliran sebagai ketua ASEAN menolak Min Aung Hlaing. Tapi dengan sistem rotasi kini Kamboja yang menjadi ketuanya. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan ia yakin penting Myanmar menghadiri pertemuan berikutnya.

Pada bulan Januari lalu Hun Sen berkunjung ke Myanmar, menjadi kepala negara asing pertama yang mendatangi negara itu setelah kudeta. Ia berulangkali menegaskan tertarik mengakhiri kebuntuan antara ASEAN dan Myanmar.

Pada Senin (14/2) Hun Sen bertemu dengan menteri luar negeri Jepang di Tokyo yang mengatakan bersedia bekerja sama dalam mengatasi situasi di Myanmar. Kepala Angkatan Bersenjata Kamboja dan calon pengganti terkuat Hun Sen, Hun Manet menemani ayahnya berkunjung ke Myanmar.

Jepang mengambil sikap yang lebih lembut pada militer Myanmar saat negara-negara Barat memberlakukan sanksi pada jenderal-jenderal negara itu. Tapi sikap di Jepang sendiri berbeda-beda. Perusahaan minuman alkohol Kirin Holdings memutuskan untuk menarik bisnisnya dari Myanmar. Mereka juga membatalkan bisnis gabungan dengan mitra yang memiliki koneksi dengan militer.

Diplomat Kamboja Chum Sounry mengatakan kegagalan untuk mengundang Myanmar pada pertemuan menteri luar negeri pekan ini disebabkan "sedikitnya kemajuan dalam melakukan Konsensus 5 poin ASEAN", yang disepakati semua negara anggota termasuk Myanmar. ● **ans**

IDN/ANTARA

MASKOT OLIMPIADE MUSIM DINGIN BEIJING 2022

Seorang pria mengambil foto limited version Bing Dwen Dwen, maskot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 Beijing yang dihias berlian buatan, diperlihatkan di toko merchandise berlisensi untuk Olimpiade Musim Dingin, di Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok, Senin (14/2).

Bank Dunia dan IMF Pindahkan Staf dari Ukraina

WASHINGTON(IM)- Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional) mengatakan telah memindahkan beberapa anggota staf dari Ukraina untuk sementara waktu, Selasa (15/2). Pemindahan itu dilakukan di tengah peningkatan kekhawatiran soal kemungkinan serangan oleh Rusia terhadap Ukraina.

Namun, Bank Dunia dan IMF sama-sama menjamin bahwa kegiatan mereka menyangkut peminjaman dan pemberian dukungan di Ukraina terus berjalan. "Prioritas utama World Bank Group adalah untuk menjaga keselamatan staf kami beserta keluarga mereka. Sejalan dengan kebijakan kami terkait evakuasi, pemindahan sementara bagi staf sedang dilakukan dan langkah pengamanan sedang ditingkatkan," menurut memo yang dikeluarkan Bank Dunia seperti dikutip dari Antara.

Namun demikian, pemberitahuan itu tidak menyebutkan secara rinci mengenai ke mana atau berapa banyak anggota staf yang dipindahkan.

Sementara itu IMF juga menyatakan telah merelokasi perwakilannya yang berada di Ukraina, Vahram Stepanyan, keluar dari negara itu. Hal ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara IMF. Stepanyan yang berkewarganegaraan Armenia, telah memimpin IMF di Ibu Kota Kiev sejak Juli 2021 dan bekerja bersama para karyawan lokal.

"Staf IMF masih berhubungan dan melakukan kontak dengan mitra-mitra mereka di Ukraina," kata jubir IMF.

Juru bicara World Bank Group juga mengatakan bahwa kegiatan Bank Dunia di Ukraina akan terus berlanjut.

Sebelumnya, Kedutaan AS di Ukraina juga telah lebih dulu merelokasi stafnya di Kiev. "Staf Kedutaan AS dipindahkan ke Kota Lviv di Ukraina barat," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa (15/2).

Menurut Blinken, pemindahan itu didasarkan atas peningkatan besar-besaran jumlah pasukan Rusia. IMF menjalankan program pinjaman senilai lima miliar dolar AS (sekitar Rp71,6 triliun) bagi Ukraina, sementara Bank Dunia telah memberikan pendanaan 1,3 miliar dolar (sekitar Rp18,6 triliun) kepada Ukraina sejak awal pandemi Covid -19.**gul**

Kartel Meksiko Paksa Anggotanya Jadi Kanibal

MEXICO CITY(IM) - Sebuah kartel narkoba di Meksiko memaksa anggotanya melakukan kanibalisme setelah video yang beredar di daring menunjukkan anggota geng memakan bagian tubuh musuh mereka. Rekaman yang diunggah oleh kartel Jalisco New Generation Cartel (JNGC) menunjukkan salah satu anggotanya memakan jantung musuh yang tewas, langsung dari dadanya, di Negara Bagian Zacatecas pada Januari 2022, demikian dilaporkan lapor Daily Mail.

Kartel CJNG diyakini dipimpin oleh Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes dan merupakan salah satu geng narkoba terkuat dan paling dominan di wilayah tersebut. CJNG beroperasi di setidaknya 35 negara bagian di seluruh Meksiko dan Puerto Riko. Pemandangan mengerikan dalam video tersebut memperlihatkan anggota CJNG berjongkok di samping tubuh musuhnya dari kartel Sinaloa, geng saingan yang sebelumnya dipimpin oleh El Chapo.

Lengan korban diikat dan dadanya terlihat seperti dirobek. 'Teknik intimidasi' ekstrem ini dikatakan digunakan untuk menakut-nakuti geng saingan dan telah menjadi bagian dari metode inisiasi Jalisco sejak 2015, demikian dilansir LadBible.

"Mengingat peringatannya kepada orang-orang bersenjata Mayo Zambada lainnya, video itu jelas dibuat untuk tujuan PSYOPS (operasi psikologis yang bertujuan untuk mempengaruhi emosi penonton mereka dan tujuan penalaran). oleh unit CJNG yang terlibat dalam insiden tersebut yang kemudian mengunggahnya ke media sosial," kata Dr Robert Bunker, seorang analis keamanan dan pakar kartel Meksiko kepada Daily Beast:

Robert Almonte, konsultan keamanan dan pakar kartel Meksiko yang berbasis di Texas, mengatakan kepada New York Post awal bulan ini bahwa kartel Meksiko memiliki filosofi "jika Anda tidak bersama kami, Anda menentang kami". "Itu termasuk polisi yang menolak untuk disogok, komunitas lokal, dan saingan mereka."

Anggota CJNG diajari teknik tempur dan cara mengoperasikan senjata.

Dipercaya juga bahwa memakan daging manusia adalah bagian dari skema pelatihan kelompok tersebut. Mereka juga diajarkan teknik penyiksaan seperti memotong jari tangan dan kaki, yang merupakan cara interogasi favorit kartel itu. "Mereka diberi pilihan salah satu dari potongan itu untuk dimakan di depan bos. Anda harus melakukannya tanpa bereaksi atau muntah atau Anda akan dipukuli. Jika Anda tidak ingin (memakan daging manusia) mereka tidak akan membiarkan Anda pergi, mereka menahan Anda di sana,"kata seorang mantan anggota CJNG kepada Daily Beast.

Mereka yang melanggar aturan dilaporkan dibunuh secara brutal di depan anggota lain. "jika rekrutan sekolah teror menunjukkan rasa takut atau melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka langsung menjadi korban dari peserta pelatihan lain yang memotong-motong dan memenggal kepala mereka (dan) daging mereka kemudian dimakan,"kata mantan kepala operasi internasional badan narkotika Amerika Serikat, DEA Mike Vigil mengatakan kepada Daily Beast,

Inisiasi mengerikan dikatakan sebagai bagian dari filosofi menyimpang kelompok itu, yang mereka percaya menanamkan rasa loyalitas kepada kartel. ● **ans**

IDN/ANTARA

PROMOSI FILM UN ETE COMME CA'

Sutradara Denis Cote dan aktris Laure Giappiconi menghadiri sesi pemotretan untuk mempromosikan film 'Un ete comme ca' (That Kind of Summer) di Festival Film Internasional Berlinale ke-72 di Berlin, Jerman, Senin (14/2).

Perawat Australia Gelar Mogok Kerja Tuntut Kenaikan Gaji

SYDNEY(IM) - Ribuan perawat di negara bagian terpadat Australia meninggalkan pekerjaannya pada Selasa (15/2), pertama kalinya dalam hampir satu dekade, untuk memulai pemogokan selama 24 jam.

Aksi itu menyusul kegagalan pembicaraan dengan pemerintah untuk mengatasi kekurangan staf dan menetapkan kenaikan gaji.

Perawat dan bidan di seluruh Negara Bagian New South Wales (NSW) melanggar perintah menit terakhir oleh komisi hubungan industri negara bagian untuk membatalkan pemogokan yang dikatakannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Para perawat berkumpul di depan gedung parlemen negara bagian di Sydney dan memegang plakat bertuliskan "Lelah, lelah, lelah dan lelah", "Butuh lebih banyak perawat sekarang" dan "Berhenti menyuruh kami untuk mengatasinya".

Perawat telah menuntut kenaikan gaji lebih dari 2,5 persen dan rasio perawat-pasien yang lebih baik. Pemogokan itu akan berlangsung sepanjang hari dan mencakup staf dari lebih dari 150 rumah sakit di seluruh NSW.

Menteri Kesehatan NSW Brad Hazzard mengatakan aksi itu "sangat disayangkan" dan "mengecewakan" bahwa para perawat bersikeras dengan pemogokan. Kepada stasiun radio 2GB, Hazzard mengatakan pemerintah sedang mencari solusi tetapi mengatakan beberapa menyarankan perubahan terhadap rasio perawat-pasien akan memakan biaya "satu miliar dolar".

Kemunculan Omicron, varian yang cepat menular di Australia pada akhir November lalu memicu lonjakan infeksi Covid-19 dan membuat rumah sakit kewalahan. Tercatat sekira 2,6 juta kasus terkonfirmasi secara keseluruhan di negara itu

Jumlah kasus baru cenderung lebih rendah dalam beberapa hari terakhir. Hanya 23.000 kasus baru dilaporkan pada Selasa siang, sementara kasus rawat inap turun ke sekitar 3.000 kasus dari puncaknya sebanyak 5.400 kasus tiga pekan lalu. Pejabat setempat mencatat 46 kematian baru, sehingga total selama pandemi menjadi sebanyak 4.664 kematian. ● **gul**